

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun hal tersebut belum sepenuhnya berdampak dan dirasakan oleh masyarakat dalam negeri. Salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang baik adalah Provinsi Bali. Provinsi Bali memiliki 8 kabupaten dan 1 kota yang tersebar secara luas. Salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Bali adalah Kabupaten Badung. Kabupaten Badung merupakan salah satu kabupaten yang ada di Bali dengan perkembangan ekonomi yang cukup baik diantara kabupaten lainnya, hal tersebut dilihat dari UMK (Upah Minimum Kabupaten) yang tertinggi se-Bali dan besarnya pendapatan pajaknya.

Dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Bali banyak lembaga keuangan mikro yang tumbuh dan berkembang, yaitu seperti Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Lembaga Perkreditan Desa merupakan lembaga keuangan yang dibentuk oleh masyarakat di masing – masing desa adat untuk membantu ekonomi krama desa yang didasarkan pada *awig-awig* desa adat setempat dengan berbasis budaya dan adat istiadat. Tujuan didirikan LPD adalah untuk mendorong, memajukan serta mensejahterakan perekonomian masyarakat daerah. Banyaknya lembaga keuangan mikro yang sudah cukup berkembang di Bali membuat pihak Lembaga Perkreditan Desa yang ada di setiap desa adat dituntut untuk tetap bertahan dan tumbuh dengan meningkatkan kinerjanya, mengingat LPD juga bersaing dengan lembaga keuangan mikro lainnya seperti Bank Perkreditan

Rakyat (BPR), Koperasi, dan lain – lain untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat daerah.

Untuk tetap tumbuh dan berkembang pada lingkungan pesaing, Lembaga Perkreditan Desa harus meningkatkan kinerjanya dengan cara menyajikan laporan keuangan yang baik dengan menyajikan data sesuai dengan keadaan yg sebenarnya, karena kualitas lembaga/perusahaan dinilai melalui hasil laporan keuangan yang dimilikinya. Laporan keuangan dapat menggambarkan keefektifan suatu perusahaan dan memuat informasi-informasi penting yang dibutuhkan oleh masyarakat dan juga para stakeholder. Menurut Kieso, Weygant & Warfird (2018:2) laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Kasmir (2014) mendefinisikan laporan keuangan sebagai laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Sehingga, laporan keuangan merupakan data keuangan yang berisi informasi yang berhubungan dengan transaksi – transaksi yang terjadi selama periode tertentu dan informasi yang disajikan tersebut akan mencerminkan bagaimana posisi keuangan perusahaan atau lembaga pada saat itu.

LPD merupakan lembaga penghimpun dana kepada masyarakat. LPD dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang memiliki kualitas yang baik. Laporan keuangan dengan kualitas yang baik adalah laporan keuangan yang disusun secara tepat waktu, informasi yang disajikan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya dan dapat dimengerti oleh pihak yang berkepentingan untuk dijadikan sebagai pengambilan suatu keputusan. Dalam menyusun suatu laporan keuangan yang berkualitas, ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan oleh LPD,

faktor tersebut terdiri dari etika kepemimpinan, tingkat pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, kompetensi sumber daya manusia, peran badan pengawas dan motivasi kerja.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah etika kepemimpinan. Perusahaan atau lembaga dalam menjalankan usahanya memerlukan seorang pemimpin yang memiliki etika yang baik. Menurut K. Bertens (2013:107-112) Etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral, yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kepemimpinan adalah suatu yang melekat pada diri seorang pemimpin yang berupa sifat-sifat tertentu seperti: kepribadian (*personality*), kemampuan (*ability*), dan kesanggupan (*capability*), kepemimpinan sebagai rangkaian kegiatan (*activity*) pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan (*posisi*) serta gaya atau perilaku pemimpin itu sendiri (Wahjosumidjo, 1987:11). Etika kepemimpinan memiliki arti mengenai bagaimana cara pemimpin dalam memimpin pengikutnya dengan tetap menerapkan suatu kaidah, nilai dan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat dan perusahaan. Etika kepemimpinan juga dianggap sebagai cara – cara yang dianggap benar secara umum oleh sekelompok atau suatu komunitas masyarakat dalam upaya mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah tingkat pemahaman akuntansi. Dalam menyusun dan membuat suatu laporan keuangan, pemahaman akuntansi sangatlah diperlukan. Adanya kecerdasan atau pengetahuan tentang akuntansi akan membuat kualitas laporan keuangan suatu perusahaan akan terhindar dari adanya kesalahan – kesalahan informasi yang dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang pemahaman akuntansi itu sendiri.

Sehingga, pemahaman akuntansi merupakan sejauh mana kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk memahami akuntansi baik sebagai perangkat pengetahuan maupun sebagai proses ataupun praktik.

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas faktor mengenai pemanfaatan sistem informasi akuntansi (SIA) juga perlu diperhatikan. SIA dapat membantu para akuntan dalam pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang akurat dan tepat waktu. SIA sangat terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan aplikasinya dilakukan dengan komputer. Pemanfaatan sistem informasi berbasis komputer sebagai salah satu bentuk teknologi informasi telah mengubah pengolahan data akuntansi dari manual menjadi otomatis (Hidayati, 2016). Semakin baik pemanfaatan SIA di dalam perusahaan ataupun lembaga maka kualitas laporan yang dihasilkan akan baik.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah kompetensi sumber daya manusia. Dalam penyusunan laporan keuangan peran SDM juga perlu diperhatikan. Peran SDM sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan pekerjaan, karena SDM adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi tujuannya. Sebaik apapun sistem yang ditetapkan pada suatu lembaga akan terbuang sia-sia, apabila tidak ditunjang oleh kualitas SDM yang memadai khususnya kualitas pribadi SDM yang terdiri dari potensi pendidikan, pengalaman, dan pelatihan.

Selain faktor kompetensi sumber daya manusia, peran badan pengawas juga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Peran badan pengawas internal dalam mengawasi operasional LPD bisa dilakukan oleh siapa

saja pada desa pakraman bersangkutan tanpa mengenal jenjang dan jenis pendidikan selain itu badan pengawas internal dapat berperan sebagai auditor internal yang akan mengontrol laporan keuangan agar data dalam laporan keuangan terhindar dari adanya manipulasi. Badan pengawas LPD berfungsi sebagai internal auditor yang dibentuk oleh desa dan bertugas untuk mengawasi jalannya kebijaksanaan dan pengelolaan usaha LPD. Dalam praktik akuntansi, pelaporan keuangan akan menjadi penghubung antara pengelola dan auditor eksternal. Peran badan pengawas selain sebagai auditor internal juga sebagai bagian yang dapat memajukan LPD.

Faktor selanjutnya adalah motivasi kerja, menurut Setiawan dan Gayatri (2017) motivasi kerja merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh seseorang, karena tanpa adanya motivasi untuk bekerja akan sulit untuk menyelesaikan atau memperoleh tujuan yang diinginkan. Motivasi merupakan faktor penting yang harus dimiliki oleh seorang karyawan atau pegawai untuk mendapatkan hasil kerja yang efektif. Motivasi kerja di dalam suatu perusahaan atau lembaga lebih diarahkan untuk memberikan dorongan dan kekuatan dalam diri seorang pegawai yang akan mempengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terhadap pelayanan.

Secara kelembagaan, menurut Kepala Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan desa (LPLPD) Provinsi Bali, pada tahun 2020 telah tercatat sejumlah 1.435 LPD yang beroperasi di desa pakraman di Provinsi Bali. Lembaga tersebut tersebar di 8 Kabupaten di Bali. LPD di Kabupaten Badung terdiri dari 122 LPD yang tersebar di 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Kuta,

Kecamatan Kuta Selatan, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Petang dan Kecamatan Mengwi.

LPD di Kecamatan mengwi tergolong LPD yang memiliki perkembangan yang stabil. Dilihat dari keberadaannya sampai saat ini perkembangan LPD sudah memperlihatkan laba dan kinerja yang baik dan hal tersebut sudah dirasakan oleh krama desa adat dalam menopang pembangunan serta pelaksanaan upacara adat maupun dalam meningkatkan sumber daya manusia di desa pakraman tersebut. Salah satu contoh LPD yang sudah memperlihatkan laba yang baik adalah LPD Desa Adat Penarungan, yang dimana pada masa pandemi ini masih tetap mengalami peningkatan aset pada tahun 2020. Aset LPD mencapai Rp. 62,9 miliar dengan laba sebesar Rp. 1,5 miliar serta dana pembangunann ke desa adat mencapai Rp. 307 juta (www.balibanknews.com 2021).

Namun, salah satu LPD di Kecamatan Mengwi juga ada yang terlibat kasus penggelapan dana yang dilakukan oleh Ketua LPD itu sendiri. LPD yang terlibat kasus korupsi itu adalah LPD Desa Adat Gulingan. Penggelapan dana yang dilakukan oleh Ketua LPD tersebut mengakibatkan kerugian sekitar 30 miliar. Penggelapan dana tersebut dilakukan dengan cara membuat kredit fiktif dan pencairan deposito tanpa sepengetahuan nasabah. Hal tersebut diketahui setelah ada perbedaan daftar nominatif pinjaman yang ada di sistem dan di neraca (news.detik.com 2022).

Dari kasus tersebut dapat dilihat tidak meratanya keberhasilan LPD di Kecamatan Mengwi. Pemimpin dan pengawas LPD tidak menerapkan etika yang seharusnya diterapkan seorang pemimpin justru ketua LPD tersebut menggelapkan dana yang dihimpun dari nasabah. Dari adanya kasus tersebut penulis ingin

melakukan penelitian dilokasi tersebut, apakah variabel yang digunakan peneliti akan diterapkan dan diperhatikan pada LPD di Kecamatan Mengwi yang nantinya akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dibuat.

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan Anggreni (2021), berdasarkan hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa etika kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Suari, dkk (2019) meneliti mengenai pengaruh tingkat pemahaman akuntansi dan peran badan pengawas terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa tingkat pemahaman akuntansi dan peran badan pengawas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian juga dilakukan oleh Dewi dan Ernawatiningsih (2019) mengenai pengaruh pemanfaatan SIA terhadap kualitas laporan keuangan, hasil penelitian yaitu tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka pada kesempatan ini peneliti ingin melakukan penelitian dengan mengangkat judul “**Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung**”.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah etika kepemimpinan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mengwi?

- 2) Apakah tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mengwi?
- 3) Apakah pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mengwi?
- 4) Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mengwi?
- 5) Apakah peran badan pengawas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mengwi?
- 6) Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mengwi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh etika kepemimpinan terhadap kualitas laporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mengwi.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mengwi.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mengwi.

- 4) Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mengwi.
- 5) Untuk mengetahui pengaruh peran badan pengawas terhadap kualitas laporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mengwi.
- 6) Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kualitas laporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mengwi.

1.4 Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang akuntansi di dalam penyusunan laporan keuangan. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk dilakukan perbandingan untuk penelitian yang sejenis.

b) Manfaat Praktis

1) Bagi Lembaga Perkreditan Desa

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak lembaga sebagai pertimbangan untuk langkah selanjutnya agar lebih etis dan professional terutama dalam kualitas keuangan. Serta dapat memberikan masukan kepada pihak lembaga sehingga dapat lebih meningkatkan lagi dalam pembuatan laporan keuangan yang berkualitas.

2) Bagi Masyarakat

Dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat maupun *stakeholder* untuk mengetahui bagaimana kualitas laporan keuangan LPD sehingga dapat digunakan sebagai alat pengawasan mengenai kinerja LPD.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Ekonomi Kelembagaan Baru (*New Institutional Economic*)

Teori kelembagaan atau *institutional theory* dapat didefinisikan sebagai teori yang menjelaskan tentang bagaimana suatu perusahaan berkembang dan bertahan dalam lingkungan yang komparatif yang penuh dengan para pesaing, serta mempelajari bagaimana cara perusahaan untuk memuaskan *stakeholders*.

Para ekonom memberikan perhatian besar pada seperangkat ide yang kemudian dikenal dengan istilah "ekonomi kelembagaan baru" (*new institutional economics*). Aliran Ekonomi Kelembagaan Baru (*New Institutional Economic* disingkat NIE) dikembangkan pada tahun 1930-an, NIE merupakan upaya "perlawanan" sekaligus pengembangan ide ekonomi non-klasik (Yustika, 2007).

NIE menempatkan diri sebagai pembangun teori kelembagaan non-pasar (*non-market institutitons*) dengan pondasi teori ekonomi. Menurut Williamson sendiri, istilah NIE digunakan untuk memisahkan dengan istilah lain, yakni OIE (*old institutional economics*) yang dipelopori oleh Common dan Veblen. Mazhab OIE berargumentasi bahwa kelembagaan merupakan faktor kunci dalam menjelaskan dan memengaruhi perilaku ekonomi, namun dengan sedikit analisis dan tanpa kerangka teoritis yang mumpuni (Yustika, 2007).

NIE mencoba memperkenalkan pentingnya peran dari kelembagaan, namun tetap berargumentasi bahwa pendekatan ini bisa dipakai dengan

menggunakan kerangka ekonomi neoklasik. Dengan kata lain, di bawah NIE beberapa asumsi yang tidak realistis dari neoklasik (seperti informasi yang sempurna, tidak ada biaya transaksi/*zero transaction costs*, dan rasionalitas yang lengkap) diabaikan, tetapi asumsi individu yang berupaya untuk mencari keuntungan pribadi (*self-seeking individuals*) untuk memperoleh kepuasan maksimal tetap diterima. Selbihnya, kelembagaan dimasukkan sebagai rintangan tambahan di bawah kerangka kerja NIE (Yustika, 2007).

NIE membangun gagasan bahwa kelembagaan dan organisasi berupaya mencapai efisiensi, meminimalisasikan biaya menyeluruh bukan hanya ongkos penciptaan atau pengkondisian kelembagaan, dan utamanya memfokuskan kepada pentingnya kelembagaan sebagai kerangka interaksi antar individu (Yustika, 2007). Sehingga dalam penelitian ini menggunakan Teori Kelembagaan Baru karena fokus utamanya kepada pengkondisian kerjasama suatu kelembagaan atau organisasi dalam membuat suatu laporan keuangan yang diteliti disini adalah karakter orang - orang yang bertanggung jawab dalam pembuatan laporan keuangan yaitu etika yang dimiliki pemimpin, tingkat pemahaman akuntansi yang membuat laporan keuangan, pemanfaatan sistem informasi akuntansi bagi karyawan yang menggunakan dan mengolah data transaksi yang berkaitan dengan akuntansi, sumber daya manusianya berkompeten sehingga dapat bertanggung jawab terhadap tugas dan motivasi kerja dari para karyawan agar lebih giat akan tugas yang dipertanggungjawabkannya.

2.1.2 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) adalah teori yang menjelaskan hubungan kerja antara pihak manajemen (*agent*) dengan pemilik perusahaan (*principal*).

Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori ini menyatakan bahwa hubungan keagenan muncul karena adanya kontak antara pemilik (*principal*) dengan seseorang (*agent*) yang memiliki kemampuan profesional untuk melakukan pekerjaan atas nama pemilik dan perusahaan. Teori keagenan menjelaskan tentang adanya pemisahan fungsi antara pemilik (*principal*) dengan pengelola (*agent*). Perusahaan yang mana sebagai titik temu antara pemilik dan pengelola berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*, dalam hal ini yaitu lembaga keuangan (LPD) sebagai *agent* sedangkan nasabah/anggota LPD sebagai *principal*.

Hubungan antara pemilik dan pengelola perusahaan dapat mengarah kepada ketidakstabilan informasi (asimetri informasi) karena pengelola perusahaan/lembaga keuangan cenderung lebih mengetahui informasi internal dan prospeknya di masa yang akan datang dibandingkan dengan pemegang saham dan stakeholder lainnya. Adanya asimetri informasi dapat membuka peluang bagi pihak pengelola untuk melakukan tindakan dengan tujuan memperoleh kepentingan untuk dirinya sendiri.

Dalam hal ini LPD sebagai lembaga keuangan yang sangat terikat dengan nilai-nilai budaya serta menganut motif pelayanan sebagai tujuan utamanya dalam organisasi. Salah satu pertanggungjawabannya sebagai *principal* ialah menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh LPD merupakan salah satu sumber informasi mengenai posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan LPD yang berguna untuk pengambilan keputusan yang tepat. Informasi keuangan tersebut dapat digunakan untuk menilai kondisi keuangan LPD oleh pihak prinsipal dalam LPD.

Berdasarkan pada *agency theory* tersebut, kualitas informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan pihak *agent* (manajemen LPD) dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada anggota LPD selaku *principal* bahwa mereka menerima return dana yang diinvestasikan, serta sebagai sumber informasi mengenai posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan LPD (Hendrayani, 2021). Namun, jika kualitas laporan yang dihasilkan oleh LPD buruk, maka anggota LPD dan kreditor selaku pihak *principal* akan ragu untuk memberikan dananya untuk dikelola karena tidak adanya kepastian atas return dana yang telah diberikan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pengurus LPD kemudian akan dikoreksi oleh badan pengawas LPD selaku pihak auditor internal, sehingga laporan keuangan yang disampaikan kepada anggota dapat diandalkan dan tidak menyesatkan.

2.1.3 Etika Kepemimpinan

Etika berasal dari kata Yunani *ethos* (bentuk tunggal) yang berarti tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berfikir (Sukrisno dan Ardana, 2014). Menurut K. Bertens (2013:107-112) Etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral, yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etika memberi suatu sistem pengaturan dan prinsip yang memandu dalam membuat keputusan tentang apa yang benar dan salah, serta baik atau buruk dalam situasi tertentu (Peter G. Northouse, 2017:403-409). Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi kelompok menuju pencapaian sasaran (Robbins, 2006:432).

Frisch dan Huppenbauer (2014:23-43) mendefinisikan bahwa etika kepemimpinan adalah petunjuk atau kaidah yang mengatur sikap dan perilaku

karyawan ketika bekerja di sebuah perusahaan. Etika kepemimpinan adalah suatu sikap atau perilaku yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi suatu kelompok tertentu untuk mencapai suatu tujuan perusahaan dan didasarkan pada aturan - aturan dan norma – norma yang berlaku.

Etika kepemimpinan diartikan dengan bagaimana cara pemimpin dapat memimpin pengikutnya dengan tetap menerapkan suatu kaidah, nilai dan norma yang ada dan berlaku di lingkungan masyarakat. Keberhasilan dan berkembangnya suatu perusahaan ditentukan dari etika yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Pemimpin yang etis akan mempunyai pengaruh yang positif bagi orang – orang yang dipimpinnya. Dengan mendorong nilai – nilai moral yang sama, pemimpin akan menjadi teladan dalam menciptakan lingkungan kerja yang beretika dan membangun reputasi organisasi yang kuat.

Dalam suatu perusahaan atau lembaga apabila seorang pemimpin sudah memiliki etika di dalam mengelola dan mengambil suatu keputusan akan menjadikan karyawan yang dipimpinnya memiliki etika yang baik juga. Karena, keberhasilan sebuah perusahaan tidak hanya karena seorang pemimpin yang baik dan beretika tetapi juga para karyawannya yang harus beretika sesuai dengan aturan norma - norma yang berlaku di suatu perusahaan tersebut. Etika kepemimpinan dapat terwujud apabila:

- 1) Pemimpin memiliki sifat yang jujur, bertanggung jawab dan dapat dipercaya oleh para pengikutnya.
- 2) Dapat menerima saran dan kritik yang diberi oleh para pengikutnya.
- 3) Mengerti dan paham mengenai laporan keuangan suatu perusahaan.

- 4) Bertindak profesional dan menjaga hubungan baik antara atasan dan juga pengikutnya.
- 5) Memiliki sikap yang adil, rendah hati, kritis, menghargai dan menghormati diri sendiri dan juga orang lain.

2.1.4 Tingkat Pemahaman Akuntansi

Sebuah perusahaan atau lembaga dituntut untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, kualitasnya laporan keuangan ditentukan dari sumber daya manusia yang membuat laporan keuangan tersebut. SDM dituntut untuk memiliki pemahaman dibidang akuntansi dan keterampilan yang baik. Menurut *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) menjelaskan bahwa akuntansi sebagai seni (*art*) dalam pencatatan, pengelompokan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian – kejadian secara umum bersifat keuangan termasuk juga dalam menginterpretasikan hasilnya. Menurut *American Accounting Assosiation* (AAA) akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi guna terjadinya penilaian – penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi yang memanfaatkan informasi tersebut, sehingga akuntansi harus dilakukan sebagai salah satu langkah persiapan dalam mengambil keputusan khususnya yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak serta menyangkut keuangan.

Akuntansi sebagai disiplin jasa yang mampu memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu mengenai masalah keuangan perusahaan dan untuk membantu pemakai internal dan eksternal dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Sehingga akuntansi adalah sebuah proses untuk mencatat,

menggolongkan, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah dan menyajikan data – data transaksi sesuai dengan jenisnya, sehingga dari hasil proses tersebut akan menghasilkan sebuah informasi mengenai data keuangan.

Paham menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia mempunyai pengertian “pandai dan mengerti benar” sedangkan pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Ini berarti orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti benar tentang akuntansi (Poerwadarminta, 2006). Sehingga pemahaman akuntansi diartikan sebagai orang yang benar – benar mengerti dan pandai terhadap ilmu akuntansi, mengerti bagaimana suatu proses akuntansi tersebut dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip – prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang berlaku.

Pemahaman akuntansi sangatlah dibutuhkan di dalam menyusun dan membuat suatu laporan keuangan lembaga atau perusahaan. Pengetahuan akuntansi tidak hanya perlu dimiliki oleh manajer atau pemilik perusahaan saja, akan tetapi harus dimiliki juga oleh para pemangku kepentingan terhadap pemilik bisnis. Pengetahuan yang dimiliki meliputi laporan keuangan yang digunakan. Kecerdasan atau pengetahuan tentang akuntansi yang bagus dan handal akan membuat suatu laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas dan terhindar dari adanya kesalahan – kesalahan informasi karena kurangnya tentang pemahaman akuntansi. Menurut Melati (2019) tingkat pemahaman akuntansi dibagi menjadi 3 yaitu:

- 1) Tingkat pertama atau tingkat terendah yaitu pemahaman terjemahan. Pada tingkat pertama ini diukur berdasar kemampuan seseorang dalam

menjelaskan pemahaman yang dimiliki mengenai akun-akun yang terdapat dalam laporan keuangan.

- 2) Tingkat kedua yaitu pemahaman penafsiran. Pada tingkat kedua ini diukur berdasar kemampuan seseorang dalam mengelompokkan transaksi berdasarkan akun-akun tertentu dalam suatu laporan keuangan.
- 3) Tingkat ketiga atau tingkat tertinggi yaitu pemahaman ekstrapolasi. Pada tingkat ketiga ini diukur berdasarkan bagaimana seseorang dalam pencatatan laporan keuangan dapat menghitung serta memprakirakan sesuai dengan laporan keuangan pada umumnya.

2.1.5 Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi

Pemanfaatan teknologi memiliki peranan penting di dalam suatu lembaga atau perusahaan. Teknologi dapat membantu perusahaan di dalam segala operasioanalnya agar semuanya dapat berjalan dengan cepat, mudah, efektif dan efisien. Untuk mengolah data dan menghasilkan informasi yang cepat dalam kegiatan akuntansi di dibutuhkannya sebuah sistem. Salah satu sistem yang digunakan untuk membantu para akuntan di dalam mengolah data keuangan sehingga menjadi laporan keuangan adalah sistem informasi akuntansi.

Sistem informasi akuntansi merupakan penerapan sistem yang dimulai dari pengelompokkan, penggolongan, pencatatan, dan pemrosesan aktivitas keuangan suatu organisasi atau perusahaan di dalam sebuah laporan keuangan agar menghasilkan suatu informasi. Menurut Marina (2009:32) mendefinisikan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan jaringan dari seluruh prosedur, susunan dari berbagai formulir, catatan - catatan, dan peralatan yang digunakan untuk mengolah data keuangan menjadi suatu bentuk laporan keuangan yang

digunakan oleh pihak manajemen dalam mengendalikan usahanya dan selanjutnya digunakan sebagai alat pengambilan keputusan bagi manajemen.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang dapat mengolah data transaksi sehingga menghasilkan suatu informasi mengenai keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi perusahaan didalam merencanakan, mengendalikan dan mengoperasikan sebuah bisnis sehingga informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk pengambilan suatu keputusan. Fungsi utama dari sistem informasi akuntansi adalah yaitu untuk mendorong seoptimal mungkin pekerjaan akuntan sehingga dapat menghasilkan sumber informasi yang berstruktur dan berkualitas.

Sistem informasi akuntansi memiliki peran yang penting untuk kemajuan sebuah lembaga atau perusahaan. Peranan sistem informasi akuntansi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Jika sistem dan prosedur kerja ditata secara tepat maka produk yang dihasilkan lebih efisien, melalui sistem informasi akuntansi dapat dibuat SOP sehingga tidak ada pekerjaan yang menyimpang dan memudahkan pengendalian produksi oleh manajer.
- 2) Sebuah pekerjaan yang dilakukan terencana sesuai prosedur dapat meningkatkan efisiensi. Perencanaan sistem informasi akuntansi yang baik dapat membantu jalannya suatu proses, misalnya tersedianya data dan informasi secara tepat waktu. Informasi yang diterima dengan tepat waktu dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

Pemanfaatan sistem informasi yang baik sangat berguna bagi perusahaan ataupun lembaga dalam menentukan langkah – langkah atau kebijaksanaan yang

diambil dan juga mempermudah dalam aktivitas suatu perusahaan dan lembaga. Untuk mendukung sebuah sistem perlu adanya komponen yang lengkap. Menurut Rommey & Steinbart (2015) dalam Anggraini (2021) komponen dari sistem informasi akuntansi yaitu:

- 1) Pengguna sistem.
- 2) Prosedur dan intruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data.
- 3) Data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya.
- 4) Perangkat lunak sebagai pengelola data.
- 5) Infrastruktur teknologi informasi (komputer, perangkat peripheral, dan perangkat jaringan komunikasi yang dipergunakan dalam sistem informasi akuntansi).
- 6) Pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan data sistem informasi akuntansi.

Melalui sistem informasi akuntansi para akuntan dapat menghasilkan informasi yang akurat sehingga pengambilan keputusan dengan informasi tepat waktu dapat meningkatkan kinerja karyawan.

2.1.6 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan peranan penting dalam menentukan kemajuan suatu lembaga atau perusahaan. Faktor penentu keberhasilan lembaga untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas bukan dilihat dari kuantitas sumber dayanya melainkan kualitas dari individu itu sendiri. Sumber daya manusia dengan kualitas yang tinggi akan dapat menunjang kinerja suatu organisasi sehingga dapat mengalami kemajuan.

Suatu lembaga dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, sumber daya manusianya harus berkompeten dalam bidang akuntansi. Menurut Juita (2013) Sumber daya manusia merupakan elemen organisasi yang sangat penting, karena harus dipastikan bahwa sumber daya manusia ini harus dikelola sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi sebuah tujuan.

Kompetensi adalah kemampuan individu untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar dan memiliki keunggulan yang didasarkan pada hal - hal yang menyangkut pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*), dan sikap (*attitude*) (Mardiana, 2019). Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut (Wibowo, 2014:271). Berdasarkan penjelasan tersebut, kompetensi sumber daya manusia diartikan sebagai kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, pengalaman, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya di dalam lingkungan perusahaan.

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas perlu adanya sumber daya manusia yang berkompeten dan memadai. Kompetensi sumber daya manusia dinilai dan ditentukan berdasarkan kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Dalam pekerjaan yang terkait dengan administrasi pada sebuah organisasi atau perusahaan kemampuan intelektual lebih dominan diterapkan. Kemampuan intelektual seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan bersumber

dari latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimilikinya. Kompetensi sumber daya manusia dapat ditingkatkan dengan mengikuti sebuah pelatihan – pelatihan yang terkait dengan bidang akuntansi. Kompetensi sumber daya manusia tidak hanya ditentukan oleh kemampuan intelektual saja tetapi aspek keterampilan atau kekuatan tenaga fisiknya juga diperlukan.

Thoha (2008:28) terdapat 3 (tiga) komponen utama pembentukan kompetensi sumber daya manusia:

- 1) Pengetahuan (*knowledge*), merupakan informasi yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang atau pendidikan yang telah ditempuh. Pengetahuan yang dimiliki seseorang turut meningkatkan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, karyawan yang mempunyai pengetahuan yang cukup akan meningkatkan efisiensi perusahaan.
- 2) Kemampuan (*skill*), merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seorang karyawan dengan baik dan maksimal.
- 3) Sikap (*attitude*), merupakan pola tingkah laku seorang karyawan atau pegawai sesuai dengan peraturan karyawan. Apabila karyawan mempunyai sifat yang mendukung pencapaian tujuan organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

2.1.7 Peran Badan Pengawas

LPD sebagai lembaga keuangan mikro dalam kegiatan operasionalnya perlu adanya pembinaan dan pengawasan. Pengawasan lembaga keuangan LPD diawasi oleh pihak Badan Pengawas. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan

Pengawas mempunyai pengawasan yang bersifat intren dan ekstren. Sebagai lembaga keuangan dalam melaksanakan fungsi sosial yang berhubungan dengan pemecahan masalah yang berkaitan dengan krama (masyarakat) serta melakukan sosialisai terkait keberadaan LPD, perlunya pengawasan intern yang baik, sehingga sebuah LPD harus memiliki kejelasan dalam keorganisasinya, keahlian teknis, dan pola pikir agar mampu menjalankan tata kelola, bimbingan serta tanggung jawab terhadap krama desa.

Badan Pengawas LPD disebut juga divisi audit karena memiliki peranan yang berfungsi sebagai internal auditor yang dibentuk oleh desa dan bertugas untuk mengawasi jalannya kebijaksanaan dan pengelolaan usaha LPD. Selain melakukan pengawasan Badan pengawas LPD juga memiliki peranan dalam pengendalian internnya. Pengendalian intern yang memadai mampu menjamin bahwa dalam pelaksanaan operasionalnya dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak yang akan dapat merugikan perusahaan dan terjadinya praktek – praktek yang tidak sehat.

Badan pengawas LPD dalam melakukan pengawasan bertugas melakukan penilaian independen untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan – kegiatan yang ada di LPD, dengan tujuan membantu pengurus agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Sebagai badan pengawas, pengawas melakukan beberapa tugas mengenai analisa, penilaian, memberikan saran dan berkewajiban menyediakan informasi tentang kelengkapan dan keefektifan sistem pengendalian internal LPD. Peran badan pengawas internal di dalam mengawasi operasional LPD bisa dilakukan oleh siapa saja oleh desa pakraman yang bersangkutan tanpa mengenal jenjang dan jenis pendidikan. Peran

badan pengawas selain sebagai auditor internal juga sebagai bagian yang dapat memajukan LPD.

Setiap Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dibentuk badan pengawas LPD dengan ketentuan bahwa; badan pengawas terdiri dari seorang ketua dan sebanyak – banyaknya 2 (dua) anggota, bendesa adat sebagai ketua badan pengawas serta ketua dan anggota badan pengawas tidak dibenarkan merangkap sebagai badan pengurus LPD. Badan pengawas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) memiliki tugas yaitu:

- 1) Melakukan sosialisasi mengenai keberadaan LPD.
- 2) Mengawasi proses penyaluran kredit dan penanganan kredit macet atau bermasalah.
- 3) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara periodik atau terjadwal serta identitas sesuai dengan program kerja badan pengawas.
- 4) Memotivasi dan meningkatkan kinerja LPD.

Sebagai badan pengawas internal, badan pengawas memiliki kewajiban di dalam memahami dan mengerti seluruh elemen pengendalian. Elemen pengendalian terdiri dari:

- 1) Evaluasi Pengelolaan Rasio

Fungsi audit internal harus membantu organisasi dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi rasio signifikan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan resiko dan sistem pengendalian.

2) Evaluasi Pengendalian

Fungsi audit internal harus membantu organisasi dalam memelihara pengendalian intern yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisiensi, dan efektifitas pengendalian tersebut serta mendorong peningkatan pengendalian intern secara berkesinambungan.

3) Evaluasi Proses *Governance*

Fungsi audit internal harus menilai dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses *governance* dalam mencapai tujuan. Dan selain itu audit intern harus mengevaluasi rancangan implementasi, dan efektifitas dari kegiatan, program, sasaran organisasi yang berhubungan dengan etika.

2.1.8 Motivasi Kerja

Salah satu faktor yang diperhitungkan untuk meningkatkan semangat dan gairah kerja pegawai dalam organisasi adanya motivasi dan kemampuan kerja yang dimiliki pegawainya. Motivasi kerja adalah daya dorong yang mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau dan rela untuk mengerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau keterampilan, tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2012:138). Motivasi kerja adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan (Hasibuan, 2016:111).

Dari penjelasan tersebut, maka motivasi merupakan salah satu penggerak yang dapat mempengaruhi perilaku manusia, motivasi kerja disebut juga sebagai pendorong keinginan, pendukung atau kebutuhan-kebutuhan yang dapat membuat seseorang bersemangat untuk bekerja dengan bertindak dan berbuat menurut cara-cara tertentu yang akan membawa kearah yang optimal. Motivasi kerja berfungsi sebagai penggerak atau daya dorongan untuk para karyawan agar mau bekerja dengan giat demi terciptanya tujuan.

Motivasi kerja dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu eksternal internal. Faktor internal adalah daya dorong yang berasal dari dalam diri seseorang untuk bekerja. Faktor eksternal adalah daya dorong yang berasal dari luar diri seseorang untuk bekerja misalnya dorongan dari manajer dengan diberikannya penghargaan (*reward*) apabila memiliki kinerja yang baik dalam bekerja. Menurut Melayu S.P. Hasibuan (2016:146) mengungkapkan tujuan pemberian motivasi kepada karyawan adalah untuk meningkatkan kepuasan kerja dan moral karyawan, meningkatkan produktivitas karyawan dalam bekerja, meningkatkan kedisiplinan, menciptakan hubungan kerja yang baik, meningkatkan loyalitas, mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan, meningkatkan keaktifan dan partisipasi karyawan serta mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugasnya.

Menurut Melayu S.P. Hasibuan (2016:152) jenis – jenis motivasi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu:

- 1) Motivasi positif (*intensif positif*), pimpinan memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi baik. Dengan motivasi positif ini semangat kerja bawahan akan meningkat. Insentif yang diberikan

kepada karyawan diatas standar dapat berupa uang, fasilitas, barang, dan lain-lain.

- 2) Motivasi negatif (*intensif negative*) manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hukuman kepada mereka yang pekerjaannya kurang baik (prestasi rendah). Dengan begitu karyawan akan termotivasi untuk meningkatkan prestasinya dalam waktu yang singkat.

Menurut Siagian (2008) mengungkapkan bahwa ada tiga komponen utama pembentukan motivasi kerja, yaitu:

- 1) Kebutuhan adalah kebutuhan timbul dalam diri seseorang apabila orang tersebut merasa ada kekurangan dalam dirinya. Menurut pengertian *homeostatic*, kebutuhan timbul atau diciptakan apabila dirasakan adanya ketidakseimbangan antara apa yang dimiliki, baik dalam arti fisiologis maupun psikologis.
- 2) Dorongan adalah usaha untuk mengatasi ketidakseimbangan biasanya menimbulkan dorongan. Hal tersebut merupakan usaha pemenuhan kekurangan secara terarah yang berorientasi pada tindakan tertentu yang secara sadar dilakukan oleh seseorang yang dapat bersumber dari dalam maupun dari luar diri orang tersebut.
- 3) Tujuan adalah segala sesuatu yang menghilangkan kebutuhan dan mengurangi dorongan. Mencapai tujuan, berarti mengembalikan keseimbangan dari dalam diri seseorang, baik bersifat fisiologis maupun bersifat psikologis.

2.1.9 Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak - pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan (Munawir, 2014:2). Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan posisi keuangan dan hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan, dengan begitu laporan keuangan diharapkan akan membantu bagi para pengguna (*user*) untuk membuat keputusan ekonomi.

Secara umum tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan atau entitas pada periode tertentu. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2018:3) menjelaskan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Menurut Kasmir (2014:10) tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu, yang disusun secara mendadak maupun secara berkala, serta mampu memberikan informasi keuangan kepada pihak dalam dan luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Menurut APB *Statement* No. 4 tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar dan sesuai dengan prinsip – prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP). Urutan laporan keuangan berdasarkan proses penyajian adalah:

1) Laporan Laba Rugi

Merupakan laporan sistematis tentang pendapatan dan beban perusahaan untuk satu periode waktu tertentu. Laporan laba rugi memuat informasi mengenai hasil usaha perusahaan, yaitu laba/rugi bersih, yang merupakan hasil dari pendapatan dikurangi beban.

2) Laporan Perubahan Ekuitas

Merupakan laporan yang merangkum perubahan-perubahan yang terjadi pada ekuitas pemilik selama suatu periode waktu tertentu (Kieso, Weygant & Warfield, 2018: 31). Modal pemilik akan bertambah dengan adanya investasi (setoran modal) dan laba bersih, sebaliknya modal pemilik akan berkurang karena adanya *prive* (penarikan/pengambilan uang tunai untuk kepentingan pemilik) dan rugi bersih.

3) Neraca

Adalah sebuah laporan yang menyajikan informasi mengenai sifat dan jumlah investasi dalam sumber daya perusahaan, kewajiban kepada kreditur, dan ekuitas pemilik dalam sumber daya bersih (Kieso, Weygant & Warfield, 2018: 31). Tujuan dibuatnya laporan neraca adalah untuk menggambarkan posisi keuangan perusahaan.

4) Laporan Arus Kas

Merupakan sebuah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar secara terperinci dari masing – masing aktivitas, mulai dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, sampai pada aktivitas pendanaan (pembiayaan) untuk satu waktu periode tertentu. Laporan arus kas menunjukkan besarnya kenaikan dan penurunan bersih kas dari seluruh

aktivitas selama periode berjalan serta saldo kas yang dimiliki perusahaan sampai akhir periode. Informasi tentang arus kas suatu perusahaan berguna bagi para pemakai laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas (Kieso, Weygant & Warfield, 20018:212).

5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Merupakan bagian integral (satu kesatuan) yang tidak dapat dipisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya. Tujuan catatan ini adalah untuk memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam neraca, laporan rugi laba, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta informasi tambahan seperti kewajiban kontijensi dan komitmen. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Agar suatu laporan keuangan dapat memberi manfaat bagi para pemakainya maka informasi yang terdapat dilaporan keuangan tersebut harus memiliki nilai informasi yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi yang menghasilkan suatu laporan mengenai transaksi keuangan dan laporan tersebut berisikan informasi mengenai data keuangan perusahaan. Informasi yang ada dilaporan tersebut dikatakan berkualitas jika memenuhi karakteristik syarat laporan keuangan yang berkualitas.

1) Relevan

Suatu laporan dikatakan relevan apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pengguna dan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksikan hasil evaluasi masa lalu. Informasi dikatakan relevan apabila:

- a) Memiliki manfaat memprediksi, yaitu informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- b) Memiliki manfaat umpan balik, yaitu informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu.
- c) Tepat waktu, yaitu informasi yang disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d) Lengkap, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus selengkap mungkin, mencakup semua informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.

2) Andal

Laporan keuangan dapat dikatakan memiliki karakteristik andal apabila jika informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian menyesatkan dan kesalahan material, penyajian setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi dikatakan andal apabila memenuhi kriteria di bawah ini:

- a) Penyajian jujur, yaitu informasi menggambarkan dengan jujur sesuai dengan transaksi dan peristiwa lain yang seharusnya disajikan atau secara wajar yang diharapkan untuk disajikan.
- b) Dapat diverifikasi, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji apabila pengujian dilakukan lebih dari satu kali oleh pihak yang berbeda, hasil tetap menunjukkan simpulan dan tidak jauh berbeda.

3) Dapat dibandingkan

Laporan keuangan dikatakan dapat dibandingkan apabila, informasi yang disajikan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.

- a) Perbandingan secara internal dapat dilakukan apabila entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dalam satu tahun.
- b) Perbandingan eksternal dapat dilakukan apabila entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama (antar entitas).

4) Dapat dipahami

Laporan keuangan dikatakan dapat dipahami apabila, informasi yang disajikan dapat dimengerti oleh pelanggan dan dinyatan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan para pengguna.

2.1.10 Lembaga Perkreditan Desa

Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) pada masing-masing desa adat atau desa *pakraman* di Bali dirintis oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Bali pada tahun 1984. Awalnya keberadaan dan aktivitas LPD diatur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 972 Tahun 1984

tertanggal 1 November 1984 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Bali. Peraturan ini kemudian diperkuat dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1988 tentang Lembaga Perkreditan Desa dan diperbaharui lagi dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPD, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Selain berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali, keberadaan dan aktivitas LPD juga diatur berdasarkan *awig-awig* dan atau *pararem* yang hanya berlaku pada desa *pakraman* setempat. *Awig-awig* dan atau *pararem* dibuat oleh desa *pakraman* setempat. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah salah satu wadah kekayaan desa yang berupa uang atau surat – surat berharga lainnya yang menjalankan fungsinya dalam bentuk usaha – usaha kearah peningkatan taraf hidup karma desa. Menurut Perda Tingkat I Bali Nomor 8 Tahun 2002, LPD merupakan badan usaha keuangan milik desa pakraman yang melaksanakan kegiatan usaha dilingkungan desa untuk *krama* desa. *Krama* desa adalah masyarakat yang menetap di desa *pakraman* dan menjadi warga di desa tersebut, serta mempunyai ikatan adat istiadat dan budaya. Tujuan didirikannya LPD adalah untuk:

- 1) Untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan yang terarah serta penyaluran modal yang efektif.
- 2) Memberantas praktek ijon, gadai gelap, dan lain – lain yang dapat dipersamakan dengan itu.

- 3) Menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa dan tenaga kerja di pedesaan.
- 4) Meningkatkan daya beli, melancarkan lalu lintas pembayaran, dan peredaran uang di pedesaan.

LPD sebagai Lembaga Keuangan Desa bergerak dalam usaha simpan pinjam, dimana produk jasa yang ditawarkan dalam usahanya yaitu berupa: tabungan, deposito dan pinjaman dari masyarakat yang kemudian disalurkan dalam bentuk pemberian kredit yang efektif dan terarah agar mampu membantu masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. Pengelolaan LPD sepenuhnya dilakukan oleh desa adat, dengan pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Simpanan dan pinjaman LPD hanya di perbolehkan kepada anggota desa adat. Jumlah simpanan baik tabungan maupun deposito tidak dibatasi, namun biasanya jumlah pinjaman disesuaikan dengan likuiditas LPD.

Menurut Kurniasari (2017) LPD menjadi alternatif yang sangat membantu masyarakat desa karena memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan lembaga keuangan formal, yaitu:

- 1) Pemberian kredit/pinjaman diprioritaskan bagi masyarakat ekonomi lemah sebagai modal usaha.
- 2) Bunga pinjaman ringan
- 3) Jangka waktu pengembalian 1 sampai 5 tahun tergantung besar kecilnya pinjaman, dengan sistem bunga menurun
- 4) Untuk pinjaman dalam jumlah tertentu dapat diajukan tanpa agunan/barang jaminan.

5) Tidak dikenakan biaya administrasi dan prosesnya cepat.

LPD merupakan Badan Usaha milik Desa yang beroperasi atau bergerak di bidang perkreditan mempunyai tujuan memperoleh keuntungan. Berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyetoran dan Penggunaan Keuntungan Bersih LPD ditentukan sebagai berikut; keuntungan yang didapatkan akan dialokasikan untuk cadangan modal sebesar 60%, dana pembangunan desa adat sebesar 20%, jasa produksi sebesar 10%, dana pembinaan, pengawasan dan perlindungan sebesar 5 % dan dana sosial sebanyak 5 %. Manfaat nyata dari keberadaan LPD dapat dilihat dari kontribusi sebesar 20% dari keuntungan bersih tiap tahun untuk dana pembangunan desa, serta 5% untuk dana sosial berupa uang (fresh money), maupun bentuk materi lainnya untuk menunjang pembangunan desa di Bali, sehingga dapat meringankan beban masyarakat dalam hal pembangunan desa maupun iuran dana sosial.

Menurut Kepala Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Provinsi Bali, di tahun 2020 telah tercatat sejumlah 1.435 LPD yang beroperasi di desa pakraman di Provinsi Bali. Keberadaan LPD mengikuti jumlah desa adat yang ada di Bali. Di daerah Kabupaten Badung sendiri terdiri dari 6 kecamatan dan terdapat 122 LPD yaitu di Kecamatan Petang sebanyak 27 LPD, di Kecamatan Abiansemal sebanyak 34 LPD, di Kecamatan Mengwi 38 LPD, dan di Kecamatan Kuta 23 LPD.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Dewi dan Ernawatiningsih (2019) melakukan penelitian mengenai analisis determinan kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar. Variabel independen dalam penelitian ini adalah tingkat pemahaman akuntansi, fungsi badan pengawas internal, kualitas sistem informasi akuntansi, dan kualitas sumber daya manusia. Variabel dependen yang digunakan adalah kualitas pelaporan keuangan. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dan teknis analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat pemahaman akuntansi, fungsi badan pengawas internal, kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Sedangkan kualitas sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan LPD di Kota Denpasar.

Yulianingsih, dkk (2021) melakukan penelitian mengenai pengaruh etika kepemimpinan, fungsi badan pengawas, pendidikan, pengalaman kerja dan tingkat pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan LPD di Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Variabel independen dalam penelitian ini adalah etika kepemimpinan, fungsi badan pengawas, pendidikan, pengalaman kerja dan tingkat pemahaman akuntansi. Variabel dependen yang digunakan adalah kualitas laporan keuangan. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh (*sensus*) dan teknis analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan fungsi badan pengawas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan etika kepemimpinan, pendidikan, pengalaman kerja dan tingkat pemahaman akuntansi tidak

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan LPD di Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli.

Suari, dkk (2019) melakukan penelitian mengenai kualitas pelaporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Gianyar, Bali. Variabel independen dalam penelitian ini adalah etika kepemimpinan, kualitas sistem informasi akuntansi, fungsi badan pengawas dan tingkat pemahaman akuntansi. Variabel dependen yang digunakan adalah kualitas pelaporan keuangan. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dan teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan kualitas sistem informasi akuntansi, fungsi badan pengawas dan tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan sedangkan etika kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Gianyar.

Triyani dan Tubarad (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Variabel independen dalam penelitian ini adalah sistem informasi akuntansi dan pengendalian intern. Variabel dependen yang digunakan adalah kualitas laporan keuangan daerah. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dan teknik yang digunakan adalah model *Struktural Equation Modeling* (SEM) dengan menggunakan pendekatan *Partial Least Square* (PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan sistem informasi akuntansi dan pengendalian intern secara signifikan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas-Dinas Kota Bandar Lampung dan Kota Metro.

Rahmawati, dkk (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern. Variabel dependen yang digunakan adalah kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan *sampling jenuh* dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern menunjukkan hasil yang berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Sukriani, dkk (2019) melakukan penelitian mengenai pengaruh tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan, dan penggunaan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan BUMDES di Kecamatan Negara. Variabel independen dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan, dan pengguna teknologi informasi. Variabel dependen yang digunakan adalah kualitas laporan keuangan. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan, dan pengguna teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan BUMDES di Kecamatan Negara.

Basudewa dan Putri (2020) melakukan penelitian mengenai pengaruh gaya kepemimpinan dan pemanfaatan teknologi informasi pada kualitas laporan

keuangan desa. Variabel independen dalam penelitian ini adalah gaya kepemimpinan dan pemanfaatan teknologi informasi. Variabel dependen yang digunakan adalah kualitas laporan keuangan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode *purposive sampling* dan teknik data yang digunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan gaya kepemimpinan dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan desa.

Wijayanti dan Wasita (2021) melakukan penelitian mengenai pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus pada Grand Inna Kuta Beach). Variabel independen dalam penelitian ini adalah pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan peran internal audit. Variabel dependen yang digunakan adalah kualitas laporan keuangan. Teknik pengumpulan data menggunakan *purposive sampling* dan teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan peran internal audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Suryandari dan Veronika (2019) melakukan penelitian mengenai kualitas pelaporan keuangan pada usaha bisnis apotek di Kota Denpasar. Variabel independen dalam penelitian ini adalah etika kepemimpinan, audit internal dan tingkat pemahaman akuntansi. Variabel dependen yang digunakan adalah kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etika kepemimpinan dan audit internal tidak berpengaruh

terhadap kualitas laporan keuangan pada usaha bisnis apotek di Kota Denpasar. Sedangkan tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada usaha bisnis apotek di Kota Denpasar.

Tiya dan Trisna (2020) melakukan penelitian mengenai pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Badung. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern. Variabel dependen yang digunakan adalah kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode teknik *non probability sampling* yaitu *purposive sampling* dan teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan pengendalian intern berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Badung.

Persamaan penelitian ini dengan hasil penelitian sebelumnya adalah variabel dependen yang digunakan sama dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan kualitas laporan keuangan dan variabel independen yang digunakan juga sama mengenai etika kepemimpinan, badan pengawas dan pemahaman akuntansi. Teknik analisis yang digunakan juga memiliki persamaan yaitu menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu tahun, lokasi atau tempat penelitiannya yang digunakan berbeda dan variabel bebas yang dikembangkan dalam penelitian sebelumnya yaitu kompetensi sumber daya manusia dan motivasi kerja.